

BAB I

PENDAHULUAN

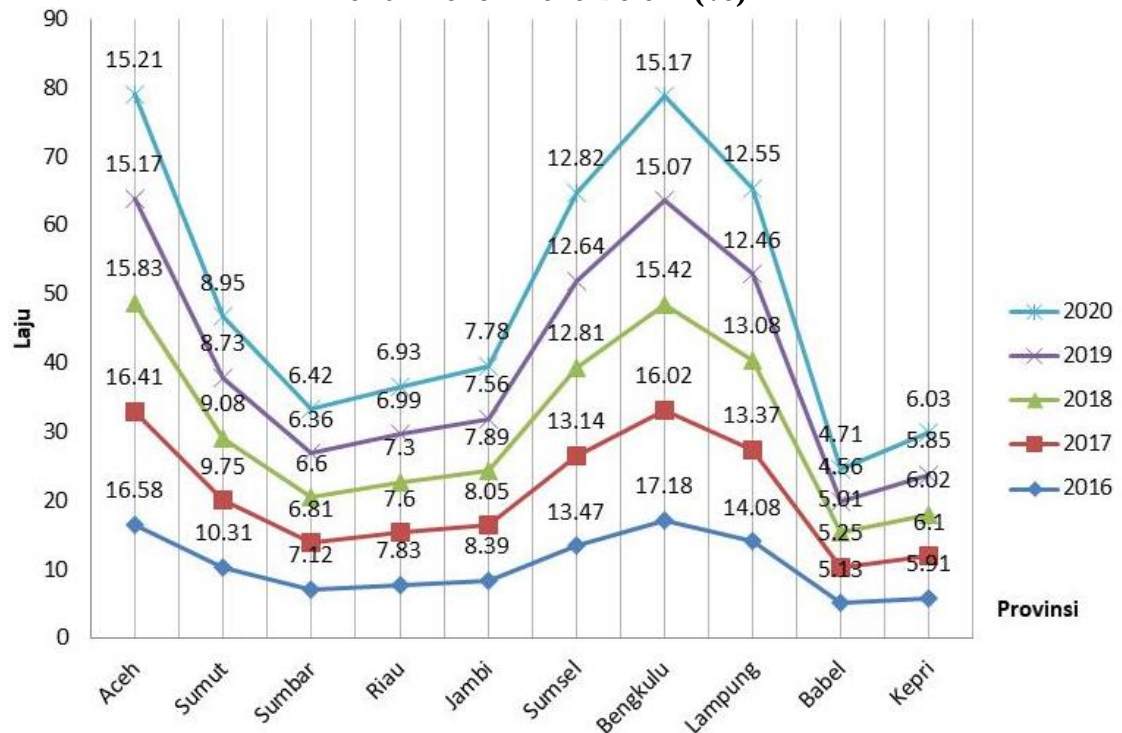
1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah umum yang terus menjadi fokus utama bagi seluruh kepala daerah di Indonesia. Kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami peningkatan akibat terjadinya wabah (pandemi) Covid 19 di seluruh dunia khusus di Indonesia. Wabah yang terjadi mendorong pemerintah untuk mengambil kebijakan untuk membatasi ruang gerak masyarakat termasuk dunia usaha, serta mendorong aktifitas lebih banyak dilakukan dirumah, dan mengurangi aktifitas yang lama di luar rumah. Kebijakan tersebut mengakibatkan banyaknya sektor usaha yang mengalami penurunan kinerja, sehingga mendorong mereka untuk mengurangi jumlah tenaga kerja.

Terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) serta banyak unit usaha yang tutup dimasa pandemi mendorong semakin meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia pada umum dan sepuluh provinsi di Pulau Sumatera pada khususnya. Kemiskinan tentu memberikan dampak negatif bagi kehidupan sosial masyarakat, kesenjangan yang terjadi akan mengakibatkan banyak permasalahan sosial, seperti meningkatnya kriminalitas, gizi buruk, serta berbagai permasalahan sosial lainnya. Oleh sebab itu pemerintah harus segera bertindak untuk paling tidak mengurangi angka kemiskinan.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Badan Pusat Statistik Nasional (BPS) diketahui perkembangan jumlah penduduk miskin pada sepuluh provinsi di Pulau Sumatera seperti terlihat pada Grafik 1.1 di bawah ini:

Grafik 1.1
Perkembangan Laju Pertumbuhan Kemiskinan di Pulau Sumatera
Tahun 2016 – 2020 Dalam (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional (2021)

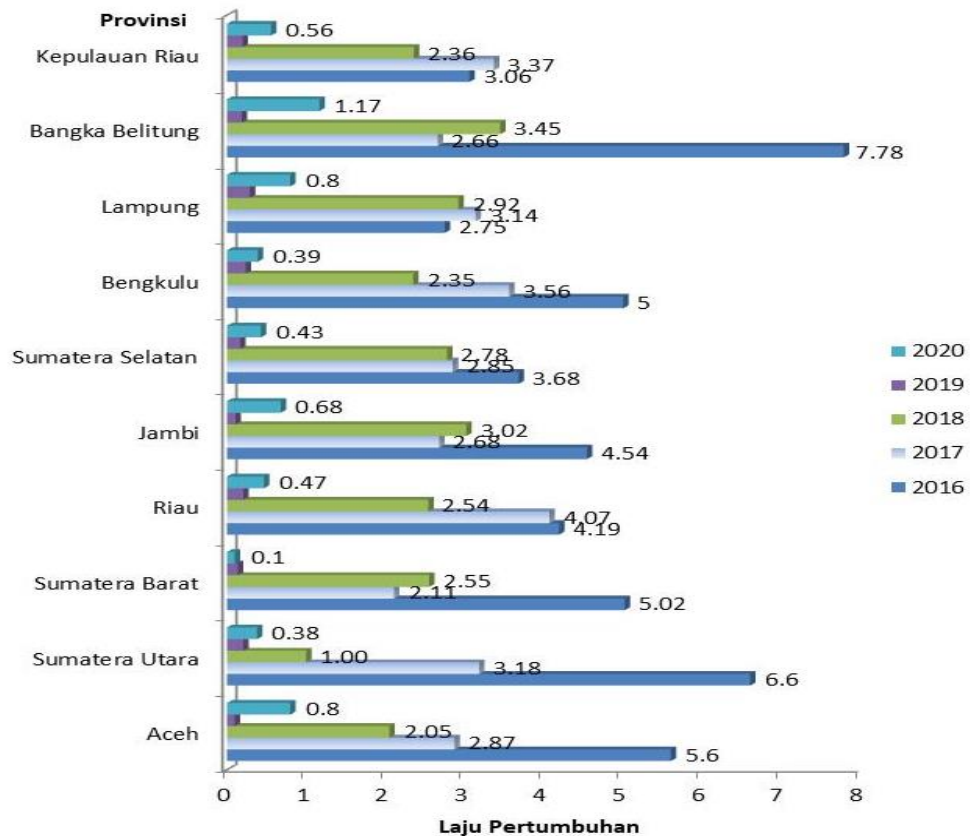
Sesuai dengan Grafik 1.1 terlihat laju kemiskinan pada sepuluh provinsi di Pulau Sumatera relatif berbeda beda, dari data terlihat Provinsi Bengkulu memiliki laju pertumbuhan kemiskinan yang relatif lebih tinggi dari provinsi yang lainnya. Hal tersebut terlihat dari laju kemiskinan di tahun 2016 yang meningkat 17.18%, hingga tahun 2020 angka kemiskinan di Provinsi tersebut masih bernilai dua digit, sedangkan laju kemiskinan paling rendah dimiliki oleh Provinsi yang baru dimekarkan yaitu Bangka Belitung dan Kepulauan Riau. Walaupun demikian laju pertumbuhan kemiskinan pada sepuluh provinsi di Pulau Sumatera tetap tinggi karena pada akhir tahun 2020 angka tersebut mencapai 9.66% dan diyakini akan meningkat pada tahun 2021 mendatang mengingat wabah pandemi Covid 19

menghambat laju pertumbuhan ekonomi seluruh provinsi di Indonesia pada umumnya dari sepuluh provinsi di Pulau Sumatera pada khususnya.

Menurut Todaro (2017) kemiskinan akan selalu mengalami perubahan, dimana penambahan dan penurunan angka kemiskinan tidak terbentuk dengan sendirinya, melainkan dapat dipengaruhi oleh sejumlah variabel diantaranya adalah inflasi, pengangguran dan perkembangan indeks pembangunan manusia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Nadhifah (2018) mengungkapkan peningkatan angka kemiskinan dapat dipengaruhi oleh laju inflasi, bertambahnya angka pengangguran dan semakin tingginya nilai Indeks Pembangunan Manusia.

Menurut Sukirno (2011) inflasi merupakan sebuah kecenderungan yang menunjukkan terjadi peningkatan harga komoditi pokok, yang disebabkan karena mata uang lokal terlalu banyak beredar di masyarakat. Ketika inflasi menguat menunjukkan mata uang yang digunakan masyarakat akan semakin mengalami penurunan nilai. Ketika terjadi inflasi angka investasi yang masuk ke sebuah daerah akan semakin menurun, ongkos produksi untuk kegiatan industri menjadi naik, sejalan dengan kenaikan harga kebutuhan masyarakat, akibatnya banyak perusahaan yang melakukan PHK serta kecilnya kemungkinan lapangan pekerjaan, sehingga mendorong meningkatnya angka kemiskinan. Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Bank Indonesia diperoleh perkembangan inflasi pada sepuluh provinsi di Pulau Sumatera terlihat pada Grafik 1.2 di bawah ini:

Grafik 1.2
Perkembangan Inflasi di Pulau Sumatera Tahun 2016 – 2020 Dalam (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional (2021)

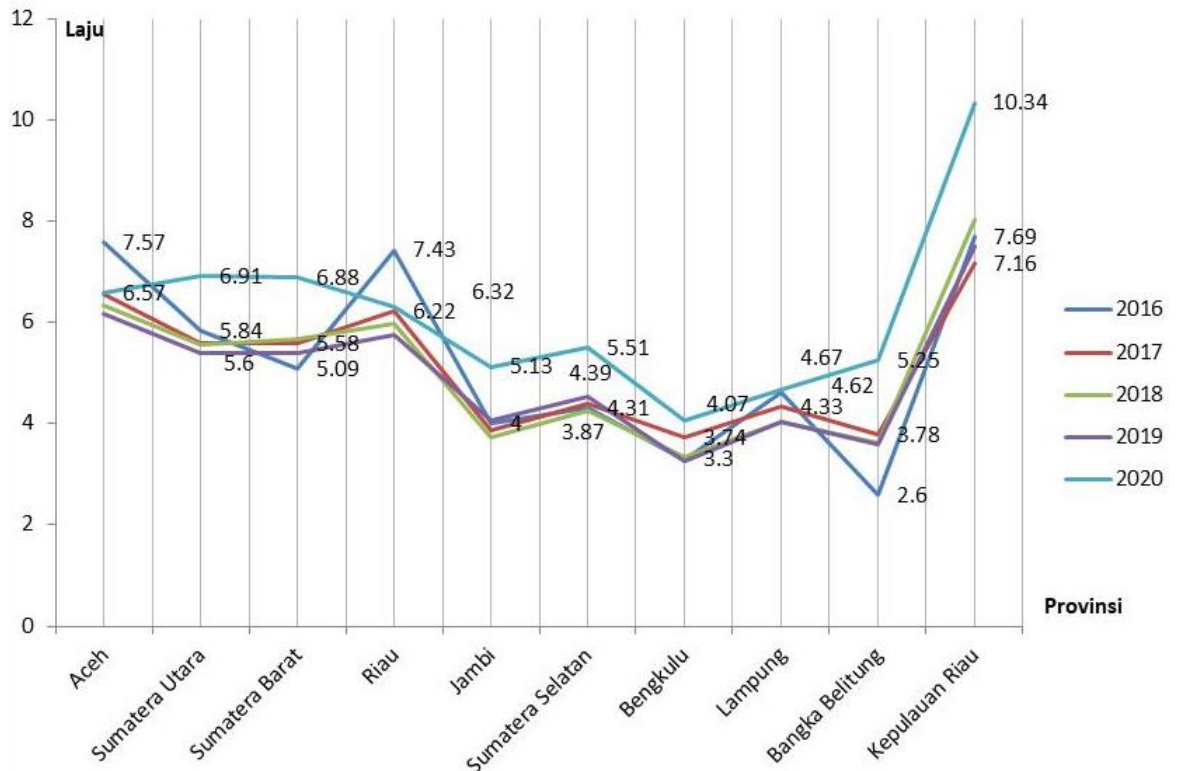
Sesuai dengan Grafik 1.2 diketahui bahwa terjadi penurunan angka inflasi pada sepuluh provinsi di Pulau Sumatera dari tahun 2016 sampai dengan 2020 yang lalu. Dari data terlihat tingkat inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2016 dengan rata rata inflasi yang terjadi pada sepuluh provinsi di Pulau Sumatera adalah sebesar 4.82%, nilai inflasi tersebut terus terkoreksi, dimana rata rata inflasi terendah terjadi di akhir tahun 2019 yang sebesar 0,19% sedangkan diakhir tahun 2020 terjadi sedikit peningkatan inflasi menjadi 0.58%. Dari data tersebut terlihat bahwa penurunan inflasi merupakan informasi yang sangat baik, karena akan membuka kesempatan investasi yang lebih tinggi, sehingga dapat mendorong berkurangnya angka kemiskinan.

Hasil penelitian Rudy dan Indah (2020) menemukan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap kemiskinan, temuan tersebut menunjukkan semakin tinggi angka inflasi akan semakin mendorong meningkatnya angka kemiskinan. Selanjutnya hasil penelitian yang sejalan juga diperoleh oleh Susanto et al., (2018) yang menemukan bahwa inflasi akan mengurangi investasi sehingga akan meningkatkan angka kemiskinan.

Disamping inflasi perubahan kemiskinan pada sebuah daerah juga dapat dipengaruhi oleh pengangguran. Menurut Todaro (2011) pengangguran menunjukkan sebuah keadaan dimana seseorang tidak memiliki sebuah aktifitas atau kegiatan yang dapat memberikan uang saku atau penghasilan baginya. Pengangguran dapat berlangsung sementara, musiman atau permanen. Semakin besar angka pengangguran menunjukkan tingginya angka individu yang tidak memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Indonesia pada umumnya dan sepuluh provinsi di Pulau Sumatera pada khususnya.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Badan Pusat Statistik Nasional dapat diperoleh laju perkembangan pengangguran pada sepuluh provinsi di Pulau Sumatera terlihat pada Grafik 1.3 di bawah ini:

Grafik 1.3
Perkembangan Laju Pengangguran di Pulau Sumatera
Tahun 2016 – 2020 Dalam (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional (2021)

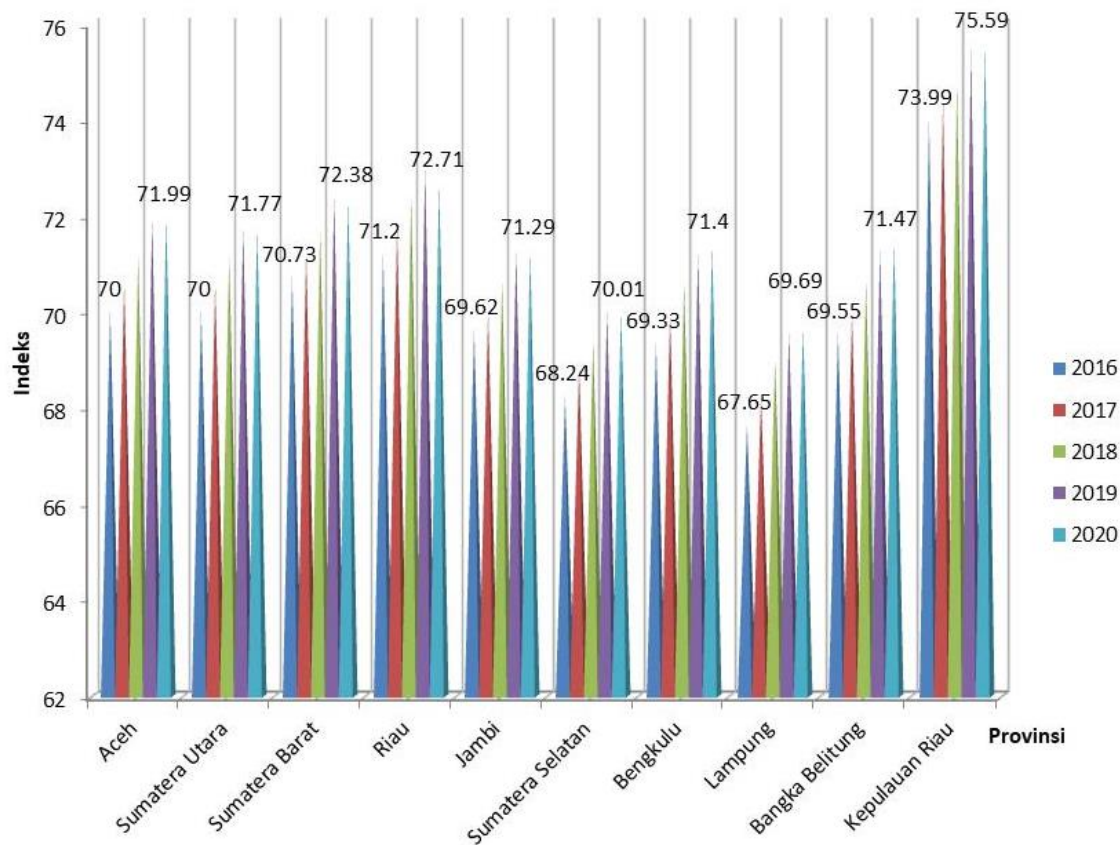
Sesuai dengan Tabel 1.3 terlihat terjadi perbedaan tingkat pengangguran pada masing-masing provinsi di Pula Sumatera, di tahun 2016 daerah dengan laju pengangguran tertinggi adalah Kepulauan Riau dengan laju pengangguran mencapai 7.69% hal yang sama juga terjadi di tahun 2017 sampai dengan 2020. Justru laju pengangguran tertinggi terjadi di tahun 2020 yang lalu yaitu mencapai 10.34%. Jika diamati secara keseluruhan rata rata pengangguran tertinggi memang terjadi di tahun 2020 yang lalu yaitu mencapai 6.17%. Pandemi Covid 19 menjadi penyebab utama meningkatnya pengangguran ditahun 2019 dan 2020, sehingga diyakini juga akan mendorong meningkatnya angka kemiskinan.

Hasil penelitian yang membahas pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan telah dilakukan oleh Ningsih dan Syechalad (2016) yang menemukan pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan di sebuah daerah. Temuan yang sama juga diperoleh oleh Lendentariang (2019) yang menemukan semakin tinggi laju pengangguran pada sebuah daerah akan sejalan dengan bertambahnya angka kemiskinan, selanjutnya hasil penelitian lain yang mendukung adalah Safuridar dan Putri (2019) yang juga menemukan pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Selain itu kemiskinan juga dapat diamati dari perkembangan indeks pembangunan manusia (IPM). Indeks tersebut diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu umur panjang atau hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Oleh sebab itu semakin tinggi nilai IPM menunjukkan semakin tinggi kesejahteraan hidup masyarakat atau semakin menurunnya angka kemiskinan di sebuah daerah.

Sesuai dengan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Nasional diketahui perkembangan IPM sepuluh provinsi di Pulau Sumatera terlihat di dalam Grafik 1.4 di bawah ini:

Grafik 1.4
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pulau Sumatera
Tahun 2016 – 2020 Dalam (Poin)



Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional (2021)

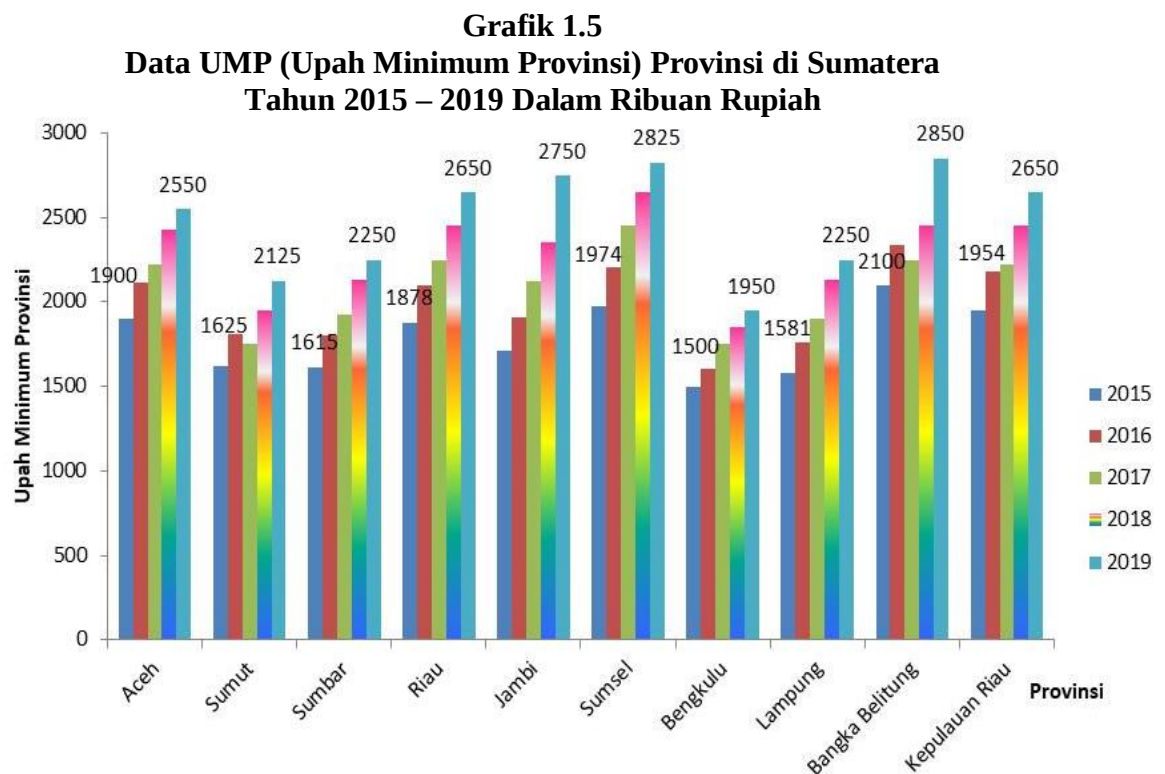
Sesuai dengan Grafik 1.4 nilai rata rata IPM sepuluh provinsi di Pulau Sumatera relatif meningkat, dimana di tahun 2016 nilai rata rata IPM adalah sebesar 70.03 poin dengan Kepulauan Riau sebagai provinsi dengan nilai IPM tertinggi yaitu sebesar 73.99%. Hingga tahun 2020 nilai IPM terus menguat menjadi 71.83% dan provinsi di Sumatera yang memiliki nilai IPM tertinggi tetap dimiliki oleh Provinsi Kepulauan Riau dengan nilai indeks sebesar 75.59%. Sejalan dengan data dapat disimpulkan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Pulau Sumatera sehingga dapat menjadi indikasi menurunnya angka kemiskinan.

Hasil penelitian membahas pengaruh IPM terhadap kemiskinan telah dilakukan oleh Safuridar dan Putri (2019) menemukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di sebuah daerah. Temuan yang sejalan juga diperoleh oleh Bandiyono (2018) yang menemukan ketika IPM menguat menunjukkan angka kemiskinan yang semakin menurun. Selanjutnya hasil penelitian Ningsih dan Syechalad (2016) yang juga mendukung hasil peneliti sebelumnya yang menemukan bahwa penguatan IPM akan menunjukkan semakin tingginya tingkat kesejahteraan atau semakin menurunnya angka kemiskinan di sebuah daerah.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat fundamental yang kerap dihadapi pemerintah daerah, disamping inflasi, pengangguran, dan indeks pembangunan manusia, berubahnya angka kemiskinan juga dapat disebabkan oleh upah minimum provinsi. Bagi pekerjaan lepas khususnya buruh mereka sering sekali mengeluhkan upah minimum provinsi yang mereka terima, mereka menilai upah minimum yang mereka terima kerap tidak dapat memenuhi kebutuhan harian, sehingga menciptakan kemiskinan dalam lingkungan masyarakat sebuah daerah. Disamping itu nilai upah minimum provinsi yang berbeda, juga disebabkan oleh potensi dan sumber daya yang berbeda dari masing-masing daerah sehingga mempengaruhi kemiskinan di masyarakat.

Besarnya upah minimum tentu dikaitkan dengan kisaran nilai pengeluaran harian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok. Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Badan Pusat Statistik Nasional terlihat masing-masing provinsi di Pulau Sumatera memiliki perbedaan nilai

upah minimum provinsi yang berbeda, seperti terlihat pada Grafik 1.5 di bawah ini:



Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional (2021)

Berdasarkan Tabel 1.5 terlihat nilai UMP masing masing provinsi di Sumatera relatif berbeda beda. Besarnya UMP menunjukkan semakin tingginya biaya hidup di sebuah daerah. Selain itu tinggi UMP yang diberikan pemerintah kepada buruh dan tenaga non formal sangat berkaitan dengan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Oleh sebab itu ketika sebuah provinsi memberikan UMP yang tinggi menunjukkan semakin meningkatnya kualitas hidup masyarakat di daerah tersebut atau mengisyaratkan semakin menurunnya angka kemiskinan di provinsi tersebut.

Sejumlah hasil penelitian terdahulu yang meneliti tentang pengaruh upah minimum provinsi dengan kemiskinan telah dilakukan oleh Aji (2019)

menemukan bahwa upah minimum provinsi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Temuan tersebut menunjukkan semakin rendah upah minimum provinsi akan semakin meningkatkan angka kemiskinan. Hasil yang sejalan juga diperoleh oleh Aprilia (2019) menemukan bahwa upah minimum provinsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, selanjutnya hasil penelitian yang berbeda diperoleh oleh Sutikno et al., (2020) menemukan upah minimum provinsi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

Berdasarkan uraian fenomena penelitian serta adanya sejumlah hasil penelitian terdahulu yang mendukung peneliti tertarik kembali mencoba mengamati sejumlah faktor yang mempengaruhi perubahan kemiskinan secara regional yaitu pada sepuluh provinsi di Pulau Sumatera. Penelitian ini bersifat empiris dan memiliki judul: **Pengaruh Inflasi, Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Kemiskinan Pada Provinsi di Pulau Sumatera.**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan kepada uraian fenomena dan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas maka dapat diajukan beberapa permasalahan yang akan segera di buktikan yaitu:

1. Bagaimanakah pengaruh inflasi terhadap kemiskinan pada provinsi di Pulau Sumatera ?
2. Bagaimanakah pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan pada provinsi di Pulau Sumatera ?

3. Bagaimanakah pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap kemiskinan pada provinsi di Pulau Sumatera ?
4. Bagaimanakah pengaruh upah minimum provinsi terhadap kemiskinan pada provinsi di Pulau Sumatera ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan uraian rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah:

1. Membuktikan dan menganalisis pengaruh inflasi terhadap kemiskinan pada provinsi di Pulau Sumatera.
2. Membuktikan dan menganalisis pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan pada provinsi di Pulau Sumatera
3. Membuktikan dan menganalisis pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap kemiskinan pada provinsi di Pulau Sumatera
4. Membuktikan dan menganalisis pengaruh upah minimum provinsi terhadap kemiskinan pada provinsi di Pulau Sumatera

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan kepada uraian rumusan masalah dan tujuan penelitian diharapkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi”

1. Praktisi, hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar rujukan dalam menyusun perencanaan strategis untuk mendorong penurunan angka kemiskinan pada seluruh provinsi di pulau Sumatera,

dengan mempertimbangkan terlebih dahulu faktor ekonomi mikro, angka pengangguran dan perubahan indeks pembangunan manusia (IPM)

2. Akademisi, hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dan referensi bagi peneliti dimasa mendatang yang juga tertarik untuk meneliti sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi perubahan kemiskinan di Indonesia.